



EVALUASI POTENSI KELOMPOK BELAJAR PAKET B UNTUK MENUNJANG WAJIB BELAJAR 9 TAHUN

Utsman✉

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Oktober 2015

Disetujui Januari 2016

Dipublikasikan Februari 2016

*Kata Kunci:**Evaluation, Package B Learning*

Abstrak

Tujuan studi evaluasi ini untuk mengidentifikasi potensi latar sosial ekonomi-demografi warga belajar, pengelola kegiatan belajar, sarana-prasarana belajar, sistem perekrutan warga belajar dan fasilitator, proses belajar mengajar, dan sistem supervisi, monitoring, evaluasi, serta pelaporan yang dilakukan pada kelompok belajar paket B di Daerah Tingkat II Jateng. Penelitian ini dengan pendekatan kualitatif pada sejumlah kelompok belajar di beberapa Dati II Jateng dengan subyek pengelola, tutor, warga belajar, dan penyelenggara. Fokus penelitian terarah pada permasalahan yang terkait dengan tujuan penelitian, dan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan, bahwa latar sosioekonomi-demografi warga belajar kurang potensial untuk mendukung kegiatan belajar, demikian juga potensi sebagian besar pengelola belajar. Potensi sarana-prasarana belajar terlihat sangat terbatas, dan hal ini berakibat pada proses belajar mengajar yang dilakukan kurang memadai, yang pada akhirnya kualitas hasil belajar belum sesuai dengan harapan. Dalam hal supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan secara ringkas dapat dinyatakan tidak sesuai dengan harapan.

Abstract

Objective studies of evaluation is to identify potential social background of economic-demographic learners, managers and learning activities, facilities studied, the system of recruitment learners and facilitators, teaching and learning, and a system of supervision, monitoring, evaluation, and reporting done in study groups package B at the Regional Level II Central Java. This study with a qualitative approach on a number of study groups in some subjects regency of Central Java with managers, tutors, learners, and organizers. The focus of research focused on issues related to the purpose of research, and the data were analyzed qualitatively. The results showed that socioeconomic-demographic background people learn less potential to support learning activities, as well as most of the potential of learning manager. Potential infrastructure of learning looks very limited, and this resulted in the learning process carried inadequate, and ultimately the quality of learning outcomes have not been in line with expectations. In terms of supervision, monitoring, evaluation, and reporting can be succinctly expressed not in line with expectations.

PENDAHULUAN

Wajib belajar tahap pertama yaitu wajib belajar 6 tahun secara kuantitas telah menunjukkan keberhasilan yang nyata, meskipun secara kualitas masih belum sesuai dengan harapan. Hal ini dapat dilihat dari indikator partisipasi anak usia sekolah dasar (usia 7-12 tahun) yang secara nasional telah mencapai 95,71%. Sementara di Propinsi Jawa Tengah tingkat partisipasi penduduk usia 7-12 tahun pada jenjang pendidikan SD sederajat telah mencapai 96,33% (Kemdikbud, 2013). Ini berarti bahwa hampir semua penduduk usia 7-12 tahun telah mengikuti kegiatan wajib belajar selama 6 tahun (pendidikan SD/MI).

Keberhasilan wajib belajar 6 tahun tersebut, mendorong pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan pada jejang yang lebih tinggi. Untuk maksud itu pada tanggal 2 Mei 1994 pemerintah telah mencanangkan kegiatan wajib belajar Dikdas 9 tahun bagi anak usia 13-15 tahun. Persoalan besar yang masih menjadi tantangan dan kendala dalam pelayanan wajib belajar Dikdas 9 tahun di antaranya adalah masalah pemerataan dan mutu, terutama pada pendidikan setingkat SLTP. Dalam kaitannya dengan pemerataan dan mutu, tantangan yang harus dihadapi tidaklah sedikit, di antaranya adalah yang pertama, terbatasnya dana, sarana dan prasarana yang tersedia untuk menunjang kegiatan wajib belajar 9 tahun. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan SLTP yang terbatas terutama di daerah-daerah pedesaan (Utsman, 2008). Kurangnya guru untuk bidang studi tertentu, serta ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan guru dengan bidang studi yang diajarnya (Depdikbud, 1998) merupakan hambatan bagi upaya peningkatan pemerataan pendidikan.

Kedua, kondisi sosial ekonomi dan aspirasi orangtua untuk menyekolahkan anak yang amat terbatas, merupakan tantangan dan kendala yang juga tidak ringan (Latief, 1996; Ghoni, 1996; Markus, 1996). Ketiga, perkembangan tingkat partisipasi anak usia 13-15 tahun pada pendidikan SLTP sederajat masih belum menggembirakan dibandingkan dengan

partisipasi anak usia 7-12 pada pendidikan SD. Laporan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2013) mencatat bahwa partisipasi anak usia 13-15 tahun pada pendidikan SLTP sederajat baru mencapai 78,3%. Sementara itu di Jawa Tengah partisipasi anak usia 13-15 tahun pada pendidikan SLTP sederajat telah mencapai di atas rata-rata nasional yaitu sebanyak 79,38% (Kemdikbud, 2013).

Upaya pemerintah dalam mendorong masyarakat agar berpartisipasi dalam pendidikan dasar 9 tahun telah dan terus diupayakan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan menjawab persolan tersebut dengan mengadakan kegiatan kelompok belajar paket B (Kejar Paket B). Gerakan belajar melalui kelompok belajar paket B dimaksudkan untuk menampung warga belajar yang tidak sempat melanjutkan ke sekolah SLTP konvensional karena berbagai alasan. Namun hingga kini pelaksanaan kelompok belajar paket B dalam kaitannya dengan wajib belajar 9 tahun, khususnya di Jawa Tengah belum menggembirakan, karena sebagian besar kelompok belajar paket B perjalanannya cukup memperhatikan. Kenyataan ini antara lain terlihat dari: (1) masih banyak warga belajar yang terdaftar pada kelompok belajar paket B hanya bisa bertahan dalam beberapa bulan saja; (2) banyak kelompok belajar paket B yang hanya tinggal papan nama; dan (3) jika ada yang terus berlangsung, kelompok belajar tersebut tidak bisa berjalan secara lancar sesuai harapan pengelolanya, artinya kegiatan belajarnya tidak rutin, warga belajar yang terlibat motivasinya sangat rendah. Padahal kegiatan kelompok belajar paket B tersebut telah menghabiskan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Kenyataan seperti ini, mengindikasikan bahwa ada sesuatu masalah yang harus segera diselesaikan, dan untuk itu perlu dievaluasi permasalahan-permasalahan yang terjadi, terutama dalam kaitannya dengan berbagai potensi yang berkaitan dengan kegiatan kelompok belajar paket B. Dengan melakukan evaluasi akan dapat diketahui kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan dalam suatu program (Stufflebeam, etc all, 2000). Selain itu dengan evaluasi akan

dapat dijadikan dasar dalam mengambil keputusan untuk keberlangsungan suatu program (Chavis, 2004; Owston, 2007; Bledsoe & Graham, 2005).

Masalah-masalah yang menjadi fokus dalam kegiatan penelitian evaluasi ini adalah bagaimana potensi latar belakang sosial ekonomi-demografi, potensi pengelola kegiatan belajar, potensi sarana-prasarana belajar, sistem perekrutan warga belajar dan fasilitator, proses belajar mengajar, dan sistem supervisi, monitoring, evaluasi, serta pelaporan yang dilakukan pada kelompok belajar paket B di Jateng? Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian evaluasi ini bertujuan mengidentifikasi potensi latar belakang sosial ekonomi-demografi warga belajar (*learner*), potensi pengelola kegiatan belajar, potensi sarana-prasarana belajar, sistem perekrutan warga belajar dan fasilitator, proses belajar mengajar, dan sistem supervisi, monitoring, evaluasi, serta pelaporan yang dilakukan pada kelompok belajar paket B di Jateng.

METODE

Pendekatan penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang diarahkan pada latar dari fokus penelitian secara holistik, baik latar individu maupun kelembagaan sebagai suatu bagian yang utuh. Lokasi penelitian dilakukan pada beberapa Dati II Jateng, alasannya karena pelaksanaan kegiatan belajar paket B di daerah tersebut berjalan cukup bagus dan bahkan sebagian PKBM dan Kejar Paket B telah menjadi juara tingkat nasional berkali-kali dalam kegiatan Apresiasi Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Infromal.

Subyek penelitian ini terdiri dari warga belajar kelompok belajar paket B, tutor/fasilitator, pengelola kelompok belajar paket B, dan pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan baik pada tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan. Fokus penelitian diarahkan pada potensi pelaksanaan kegiatan belajar paket B, yang meliputi: (1) potensi latar sosioekonomi-demografi warga belajar (2) potensi pengelola kelompok belajar paket B, (3) sistem perekrutan warga belajar, fasilitator, dan

pengelola kegiatan belajar, (4) potensi kurikulum atau bahan belajar yang diterapkan pada kelompok belajar paket B untuk menunjang kehidupan warga belajar, (5) potensi sarana prasarana kelompok belajar paket B, (6) potensi proses belajar mengajar pada kelompok belajar paket B, dan (7) potensi sistem supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang diberlakukan pada Kejar Paket B.

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara mendalam. Observasi dilakukan untuk mengamati sarana dan prasaran yang digunakan dalam proses pembelajaran, mengamati kegiatan proses pembelajaran, mengamati dokumen-dokumen yang digunakan dalam pembelajaran, baik dokumen kurikulum, buku, maupun dokumen administrasi lainnya. Metode wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi dari berbagai sumber informan tentang latar sosioekonomi-demografi warga belajar, pengelolaan kelompok belajar, sistem perekrutan warga belajar dan fasilitator, penggunaan bahan belajar, sarana prasarana kelompok belajar, proses belajar mengajar, dan sistem supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang diberlakukan pada Kejar Paket B.

Dalam rangka pembuktian temuan atau hasil lapangan dilakukan pemeriksaan keabsahan data agar penelitian benar-benar dapat diandalkan. Seale (1999) menyatakan bahwa keandalan adalah jantung dari laporan penelitian kualitatif. Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan uji keabsahan data. Data yang dikumpulkan akan diuji kualitas, ketelitian dan kepercayaan untuk dipergunakan mengevaluasi hasil penelitiannya (Davies & Dodd, 2002; Mishler, 2000; Stenbacka, 2001).

Uji keabsahan dalam penelitian ini dilakukan antara lain dengan triangulasi, perpanjangan keikutsertaan, keajegan pengamatan, pemeriksaan sejawat melalui diskusi, analisis kasus negatif, dan pengecekan anggota. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan dua strategi, yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa

metode, dan pengecekan derajat kepercayaan dengan beberapa sumber data dengan metode yang sama pada saat pencarian data di tempat kegiatan Kejar Paket B. Triangulasi dengan menggunakan sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton, 2001). Cara yang dilakukan dengan membandingkan data hasil observasi dengan wawancara; membandingkan saat situasi resmi waktu penelitian dan situasi informal; membandingkan keadaan dalam perspektif orang yang berbeda; membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang diperoleh dari lembaga pendidik Kejar Paket B.

Analisis data penelitian dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dengan berbagai sumber mulai dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil perolehan data, maka hasil penelitian dianalisis secara tepat agar simpulan yang diperoleh tepat pula. proses analisis data memiliki tiga unsur yang dipertimbangkan oleh penganalisis yaitu (1) Reduksi data (2) Penyajian data dan (3) Penarikan Simpulan..

Reduksi data pada tahap ini peneliti memusatkan perhatian pada catatan lapangan yang terkumpul, yang selanjutnya data yang terpilih disederhanakan dengan mengklasifikasikan data atas dasar fokus penelitian, memadukan data yang tersebar, menelusuri tema untuk merekomendasikan data tambahan, kemudian peneliti melakukan abstraksi kasar menjadi uraian singkat atau ringkasan. Penyajian data, pada tahap ini peneliti melakukan penyajian informasi data yang diperoleh secara keseluruhan yang telah mengalami reduksi melalui bentuk naratif agar diperoleh penyajian data lengkap dari hasil pengumpulan data yang dilakukan. Dalam hal ini peneliti membuat teks naratif mengenai informasi yang diberikan oleh subyek penelitian. Penarikan kesimpulan, pada tahap ini peneliti melakukan uji kebenaran pada setiap data yang muncul dari data yang diperoleh dari subyek satu ke subyek yang lain dengan cara melibatkan peserta didik, guru atau pendidik, kepala

sekolah, dan tidak lupa data para informan. Kesimpulan ini dibuat berdasarkan pada pemahaman terhadap data yang telah disajikan dan dibuat dalam pernyataan singkat dan mudah dipahami dengan menguji pada pokok permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Sosioekonomi dan Demografi Warga Belajar

Jumlah warga belajar Kejar Paket B yang dijadikan tempat penelitian, saat ini secara administratif masih tercatat sebagai warga belajar adalah tiap kelompok belajar sekitar 17-26. Menurut data yang ada bahwa hampir seluruh peserta kegiatan belajar berlatar belakang pendidikan SD dan madrasah, dan mereka mengikuti kegiatan belajar tersebut karena disamping kondisi ekonomi orangtua, juga karena di sekitar lokasi tidak ada kegiatan lembaga pendidikan setingkat SLTP yang bisa terjangkau dengan mudah. Warga belajar tersebut, umumnya berasal dari latar dan status ekonomi kurang beruntung, atau berasal dari keluarga miskin dan pekerjaan orang tua sebagai buruh tani dan atau bekerja pada sektor informal. Orangtua warga belajar, menurut data yang ada sebagian besar berpendidikan SD, namun ada informan lain, bahwa sebenarnya orangtua mereka umumnya tidak sekolah dan tidak tamat SD. Kondisi seperti tersebut menjadi salah satu deterrent terhadap rendahnya kualitas dan motivasi anak untuk belajar.

Menurut catatan yang ada, sebagian besar atau sekitar 65% peserta kegiatan kejar adalah wanita, dan hal ini terjadi karena menurut beberapa informan bahwa masih banyak orangtua yang berasal dari keluarga miskin lebih mengutamakan pendidikan bagi anak laki-laki, sehingga jika ada sedikit biaya, yang diutamakan terhadap pembiayaan pendidikan adalah bagi anak laki-laki. Disamping, faktor "gengsi" bagi anak laki-laki untuk mengikuti Kejar Paket B lebih dominan dibandingkan wanita. Jumlah dalam keluarga bagi warga belajar yang dijadikan subyek penelitian umumnya adalah rata-rata antara 5-6 keluarga termasuk Bapak dan Ibu. Kenyataan ini pula

yang menjadikan orangtua secara ekonomi berat untuk menyekolahkan anak. Sementara itu jika diamati dari data yang ada, tentang status perkawinan orangtua, terlihat hampir seluruhnya orangtuanya berstatus masih utuh dan tidak dalam keadaan cerai. Namun, ada beberapa warga belajar yang mengakui bahwa meskipun orangtua mereka masih utuh atau tidak cerai, namun ia jarang ketemu orangtuanya, karena orangtua bekerja dalam berbagai sektor di luar kota, dan umumnya ke Jakarta. Sementara ia sendiri tinggal bersama ibunya, ikut pada nenek atau saudaranya. Status warga belajar sendiri, sebagian ada yang sudah berkeluarga, dan jumlahnya tidak lebih dari 10%.

Kondisi fisik lingkungan mereka tinggal, semua berada di lingkungan perdesaan yang masih sarat dengan norma-norma kehidupan desa yang tradisional, sehingga bisa jadi karena faktor ini, membuat mereka kurang menaruh kepedulian terhadap arti pendidikan. Pergaulan mereka (warga belajar) umumnya bergaul dengan anak-anak desa yang masih sebaya, oleh karena itu, mereka kurang memahami makna pendidikan bagi kehidupannya kini dan kelak.. Jarak antara rumah dengan lokasi kegiatan belajar relatif terjangkau oleh warga belajar dengan kendaraan roda dua atau jalan kaki. Rata-rata jarak rumah dengan lokasi kegiatan belajar sekitar 1 sampai 3 kilo meter.

Potensi Pengelola Kelompok Belajar Paket B

Pengelola kegiatan belajar paket B adalah orang yang ditunjuk untuk berperan sebagai koordinator dan sekaligus dapat sebagai fasilitator dan atau tutor jika tutor berhalangan dalam menyelenggarakan kegiatan belajar. Pendidikan pengelola sebagian besar adalah S1 dan SLTA/SPG/SGO. Umumnya mereka menjadi pengelola minimal sudah lima tahun, dan hanya beberapa yang baru ditunjuk menjadi pengelola. Para pengelola yang sudah minimal sudah menjadi pengelola 5 tahun sebagian besar sudah pernah mengikuti beberapa kegiatan penataran/pelatihan yang dilakukan untuk pengelolaan dan atau pembelajaran pada kelompok belajar. Sementara itu para tutor yang

tergabung dalam kegiatan belajar paket B mempunyai latar belakang yang bervariasi.

Para pengelola dan atau tutor ikut terlibat dalam kegiatan belajar paket B karena berbagai alasan diantaranya: a) dianggap sebagai pengabdian kepada masyarakat, b) ingin menaruh kepedulian terhadap masalah pendidikan, c) ingin memajukan rakyat di desanya melalui pendidikan, dan e) sebagai tambahan kesibukan, terutama bagi yang belum diangkat sebagai guru tetap.

Bagi para pengelola, sebagian besar merasa siap mendapatkan tugas untuk mengelola kegiatan belajar. Namun menurut mereka, seringkali dalam melakukan pengelolaan menemukan berbagai kendala yang tidak ringan dalam memotivasi warga belajar untuk terlibat dalam kegiatan. Sementara bagi para tutor, mengakui bahwa setiap mereka akan melakukan kegiatan pembelajaran, terlebih dahulu mempersiapkan materi pembelajaran dengan baik, meskipun seringkali materi yang dipersiapkan secara matang tersebut kurang mendapat perhatian dari warga belajar. Hal ini terjadi karena, menurut tutor bahwa motivasi warga belajar umumnya sangat rendah dibandingkan di sekolah-sekolah formal.

Pengelola kegiatan belajar paket B, dalam proses pembelajaran secara umum menggunakan metode dan teknik yang sama dengan pembelajaran pada sekolah-sekolah formal, dan mereka kurang memahami tentang metode dan teknik serta proses pembelajaran pada pendidikan nonformal (kejar paket B). Mereka terlihat juga tidak memahami bagaimana melakukan motivasi belajar, karena memiliki keterbatasan tentang pengetahuan pembelajaran secara nonformal.

Pemahaman pengelola dan atau tutor terhadap materi-materi yang diajarkan dalam kejar paket B, khususnya materi pelajaran bersifat *social science* secara umum cukup, namun untuk mata pelajaran bahasa Inggris, Matematika, IPA umum diajar oleh orang-orang kurang kompeten di bidangnya. Hal ini, menjadikan warga belajar Paket B secara realistis akan tertinggal dengan SLTP konvensional.

Sistem Perekrutan Warga Belajar

Sistem perekrutan warga belajar dilakukan dengan beberapa cara secara simultan: 1) bekerjasama dengan aparat desa untuk mengidentifikasi warga desa yang tidak melanjutkan sekolah SLTP, 2) menyebarkan informasi melalui kegiatan-kegiatan organisasi yang ada di perdesaan, seperti organisasi PKK, karang taruna, dan keagamaan tentang keberadaan kelompok belajar paket B, 3) petugas tingkat kecamatan dibantu aparat desa, tokoh masyarakat, dan petugas dari penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB) melakukan pendataan secara langsung tentang anak-anak tamatan SD setempat yang tidak melanjutkan sekolah. Dalam perekrutan tersebut tidak ada sistem pemaksaan kepada calon warga belajar, namun upaya persuasif memang diakui oleh beberapa petugas yang melakukan perekrutan. Sementara untuk para tutor direkrut dengan menggunakan berbagai cara yaitu: 1) petugas penilik pendidikan luar sekolah diminta pertimbangan guna menentukan atau menetapkan para warga masyarakat yang akan direkrut menjadi tutor dan sekaligus untuk menetapkan pengelolanya; 2) menghubungi secara langsung calon-calon tutor, khususnya warga desa setempat untuk membantu pelaksanaan kelompok belajar paket B.

Penentuan waktu belajar ditentukan secara bersama antara pengelola, tutor, dan sebagian warga belajar dan kemudian dikonsultasikan kepada penilik UPTD kecamatan. Dalam hal ini tidak menjadi masalah karena yang terpenting harus diambil kesepakatan secara bersama. Secara umum kegiatan belajar terjadwal di sore hari dan pagi hari sesuai dengan kesepakatan, dan dilakukan tiga sampai 5 seminggu. Setiap kali pertemuan sekitar 4 sampai 6 jam pelajaran, dan setiap jam pelajaran rata-rata menggunakan waktu antara 40 menit. Namun relita yang ada bahwa kegiatan belajar sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi menurut informan karena warga belajar: (1) sibuk dengan urusan masing-masing, (2) kurang termotivasi dengan materi yang diberikan, dan (3) minat warga belajar untuk belajar rendah.

Penentuan tempat belajar didiskusikan bersama, khususnya oleh tutor, penyelenggara, dan pengelola. Dalam hal ini pertimbangan-pertimbangan yang diutamakan adalah pertimbangan kemampuan daya tampung, kelengkapan fasilitas belajar, penerangan, mudah dijangkau. Menurut pengamatan yang ada bahwa tempat belajar hampir semua dilaksanakan di gedung SD atau di pusat-pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dan sekaligus menggunakan berbagai fasilitas yang memungkinkan.

Sewaktu proses perekrutan, calon warga belajar maupun tutor tidak dikenakan biaya apa pun, dan bahkan para tutor. Menurut beberapa informan, juga mendapatkan sekedar uang beli sabun sekitar Rp 50.000 setiap bulan, dan diterimakan minimal dalam triwulan sekali.

Kurikulum Kejar Paket B

Materi belajar paket B yang diberikan secara umum mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan, yaitu dengan menggunakan bahan ajar yang telah disusun berdasarkan tingkat kesetaraan dari setiap mata pelajaran. Menurut para pengelola, tutor, dan warga belajar, bahwa materi tersebut belum menyentuh kehidupan warga belajar, artinya sangat sedikit bila dikaitkan dengan kebutuhan untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Materi yang diberikan lebih banyak bersifat pengetahuan dibandingkan keterampilan untuk memecahkan masalah kehidupan warga belajar, dan tidak kongruen dengan kondisi daerah di mana warga belajar berada.

Bila dikaitkan dengan dunia kerja, mereka umumnya *scope* dan lingkup, serta isi kurikulum juga tidak kongruen, karena sebagian besar warga belajar bekerja membantu orangtua sebagai buruh, tani, atau lainnya yang tidak menggunakan keterampilan-keterampilan khusus seperti berbahasa Inggris, Matematika dan sebagainya. Akibatnya warga belajar sesudah belajar seakan-akan tidak memperoleh sesuatu yang berguna dalam membantu memecahkan masalah kehidupannya, kecuali hanya sekedar mendapatkan tambahan

pengetahuan yang dianggap kurang bermakna dalam hidup.

Meskipun kegiatan belajar ini sebagai upaya penyetaraan dengan SLTP konvensional, namun menurut para tutor dan pengelola, bahwa akan sulit dan bahkan tidak mungkin pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh warga belajar bisa setara dengan yang diperoleh oleh siswa SLTP konvensional. Hal ini terjadi karena: 1) bahan belajar yang diberikan secara kualitas maupun kuantitas jauh lebih rendah dibandingkan SLTP konvensional, meskipun banyak para tutor yang mencoba menggunakan buku pendamping modul untuk kegiatan pembelajaran, 2) waktu belajar di kelas yang digunakan oleh warga belajar sangat terbatas, dan bahkan tidak lebih dari seperempat waktu belajar di SLTP konvensional, meskipun diberi modul yang secara umum tidak pernah dipelajari oleh warga belajar, dan 3) sistem belajar, kedisiplinan, sarana, tutor, dan motivasi belajar dianggap kurang kondusif, termasuk sistem evaluasi yang digunakan untuk melihat keberhasilan belajar. Atas dasar asumsi-asumsi tersebut, dan pengalaman selama ini, kemudian secara umum pengelola, tutor, dan penyelenggara bersikap pesimis terhadap apa yang hendak diharapkan dari kegiatan belajar paket B, terutama bila dikaitkan dengan pemecahan masalah hidup dan kehidupan.

Potensi Sarana-Prasarana

Potensi sarana belajar paket B seperti buku pelajaran, buku paket, dan buku modul, serta buku paket penunjang bila dilihat dari segi kuantitas hampir di semua tempat kegiatan belajar, terlihat cukup dibandingkan jumlah warga belajar, namun secara kualitas menurut para tutor, pengelola dan penyelenggara dianggap kurang memadai, oleh karena itu seringkali para tutor mencari buku-buku sendiri sebagai pendamping yang dianggap memiliki kualitas yang memadai. Namun dalam hal ini muncul persoalan baru, karena warga belajar akan mengalami kesulitan dalam proses belajar. Sarana lain seperti alat-alat peraga, teramat tidak banyak para tutor menggunakan alat peraga, karena alat peraga yang ada sangat

terbatas untuk bidang studi dan pokok bahasan tertentu. Kenyataan ini menjadi masalah tersendiri bila dikaitkan dengan proses pembelajaran yang berlangsung.

Sarana perpustakaan dan laboratorium, pada semua kelompok belajar tidak ada, dan jika ada perpustakaan, hanya berupa beberapa buku yang terkait dengan kegiatan belajar paket B yang tersimpan dalam satu-dua almari khusus, yang terlihat tidak dimanfaatkan oleh warga belajar. Prasarana seperti papan tulis, kapur, spidol, penghapus, bangku, kursi, menurut pengamatan peneliti, tidak menjadi masalah artinya cukup untuk kegiatan pembelajaran.

Sarana administrasi sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar seperti buku absen warga belajar, buku absen tutor, buku tamu, buku inventaris alat belajar dan bahan belajar tidak semua kelompok belajar memiliki secara lengkap. Namun tidak semua sarana administrasi tersebut tersusun secara rapi dan bahkan sebagian besar tidak teratur.

Potensi Proses Pembelajaran Kejar Paket B

Tutor sebelum melakukan proses kegiatan belajar, sebagian besar menyatakan telah siap, meskipun persiapan-persiapan tersebut tidak selalu diwujudkan dalam bentuk perencanaan pembelajaran seperti pembuatan satuan pelajaran dan rencana pelajaran (SP dan RP) seperti sekolah konvensional. Rata-rata proses belajar dilaksanakan tiga kali seminggu, namun ada beberapa kelompok belajar yang melakukan 5 kali seminggu. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran sebagian tutor dan pengelola kegiatan belajar, menyatakan bahwa proses belajar yang terjadi tidak berjalan sesuai dengan rencana, dan bahkan sebagian menyatakan bahwa kegiatan belajar paket B ini seringkali terjadi kemacetan karena warga belajar tidak hadir. Bahkan ada beberapa kelompok belajar paket B yang saat ini hanya tinggal nama, karena aktifitas belajar sudah tidak ada.

Sistem pembelajaran dilakukan sebagaimana belajar di sekolah, yaitu sistem belajar klasikal, karena belajar dengan cara berkelompok tidak bisa berjalan. Pembelajaran dilakukan kurang lebih 3-6 jam setiap pertemuan

dengan materi pelajaran sesuai jadwal, namun seringkali terjadi materi pelajaran yang diberikan berubah-ubah bersamaan dengan ketidakhadiran tutor yang seharusnya mengajar materi tersebut.

Pembelajaran pada paket B ini diakui oleh semua tutor sulit dilaksanakan secara maksimal, dan hal ini terjadi karena: 1). warga belajar yang hadir rata-rata tidak lebih dari 50%, 2). warga belajar yang datang memiliki motivasi belajar yang rendah, (3) warga belajar sulit menerima materi belajar yang diberikan, terutama materi seperti IPA, bahasa Inggris, dan Matematika.

Metode yang digunakan tutor dalam proses pembelajaran secara umum masih konvensional, yaitu dengan ceramah. Sementara itu, belajar dengan sistem modul sulit untuk berjalan. Penggunaan metode ini dilakukan, menurut tutor dan pengelola, karena sebagian besar tutor menirukan pola-pola pembelajaran sekolah formal sehingga belum banyak mengenal metode-metode pembelajaran yang sering diterapkan pada pendidikan luar sekolah. Hal ini berarti menunjukkan bahwa para tutor dan pengelola tidak memahami praktik-praktik pembelajaran pada pendidikan luar sekolah. Kenyataan ini terjadi karena menurut pengakuan sebagian tutor bahwa mereka belum pernah dilakukan pelatihan atau penataran dalam kaitannya dengan proses pembelajaran di luar sekolah. Mereka terlibat sebagai tutor belajar paket B karena merasa prihatin terhadap warga sekitar yang tidak sempat menikmati pendidikan di sekolah formal karena berbagai faktor, di antara faktor ekonomi, geografi, dan ketiadaan sekolah formal yang terjangkau.

Selama proses belajar berlangsung, menurut pengamatan peneliti, para tutor tidak pernah menggunakan alat peraga yang kondusif, kecuali sarana papan tulis dan kapur tulis. Hal ini terjadi karena menurut tutor, tidak tersedia alat peraga yang bisa dipergunakan untuk kegiatan pembelajaran kelompok belajar paket B. Hal ini terjadi, menurut para tutor dan pengelola, karena tidak ada bantuan baik dana maupun alat peraga dari pihak-pihak yang terkait, sementara itu peserta belajar kelompok

belajar paket B tidak dimintai sumbangan apa pun untuk kegiatan pembelajaran.

Menurut para pengelola, penilik pendidikan masyarakat, dan tutor, bahwa peserta kegiatan belajar paket B ini sebagian kecil yang bisa selesai, dalam arti yang sampai bisa mengikuti ujian persamaan setingkat SLTP, dan rata-rata sekitar hanya 20-30% pada setiap kelompok belajar. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kegiatan belajar paket B tidak bisa menuntaskan lulusan SD yang tidak bisa menikmati pendidikan formal setingkat SLTP secara keseluruhan.

Sistem Supervisi, Pelaporan, Evaluasi, dan Monitoring

Sistem supervisi yang dilakukan dalam kegiatan belajar paket B meliputi beberapa hal, yaitu supervisi administratif, dan edukatif. Supervisi administratif dan edukatif ditujukan pada program secara umum, warga belajar, tutor, sarana dan prasarana serta dana penyelenggaraan belajar. Pelaksanaan supervisi bidang-bidang tersebut, menurut para pengelola, tutor, dan warga belajar jarang dilakukan oleh petugas yang terkait. Petugas yang biasanya datang memberikan supervisi hanya dari petugas penilik pendidikan nonformal UPTD kecamatan setempat, sedangkan penilik PNF tingkat kabupaten dan propinsi hampir semua Kejar Paket B menyatakan sangat jarang, dan kira-kira setahun sekali, dan bahkan ada beberapa kelompok belajar tertentu yang menyatakan belum pernah dilakukan supervisi oleh petugas pada tingkat kabupaten dan propinsi.

Sistem supervisi yang dilakukan secara lazim hanya melakukan kunjungan ke lokasi pelaksanaan kegiatan. Bentuk-bentuk lain seperti, bantuan pemecahan masalah, konferensi kasus, dan angket belum pernah dilakukan oleh petugas hampir semua mengatakan tidak pernah dilakukan. Materi supervisi terkait dengan program-program kegiatan belajar, masalah pengelolaan kegiatan belajar, dan masalah-masalah yang terkait dengan warga belajar. Satu hal yang sampai kini belum bisa dipecahkan oleh supervisor

adalah bagaimana meningkatkan motivasi belajar dan meningkatkan kesadaran warga belajar agar mau belajar dengan rajin, tekun, dan atau setidaknya bisa belajar sampai berakhir kegiatan atau sampai bisa mengikuti ujian akhir. Sampai saat ini, semua pihak yang terkait dengan pengelolaan kegiatan belajar merasa kesulitan untuk mengatasinya, sehingga tidak sedikit warga belajar yang berhenti sebelum sampai ke tujuan.

Sistem monitoring yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten selama ini dirasakan oleh semua petugas kegiatan belajar di lapangan sangat terbatas. Monitoring biasa hanya dilakukan dalam bentuk laporan bulanan dan atau sesekali petugas meninjau ke lokasi kegiatan belajar, dan selama jarang dilakukan pertemuan-pertemuan secara khusus dengan sesama petugas (pengelola, tutor, penyelenggara) dalam satu wilayah tingkat II atau tingkat I guna membahas persoalan-persoalan yang dihadapi dalam mengelola kegiatan belajar Paket B. Akibat dari semua itu, menurut para petugas, banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan, bahkan ada kecenderungan masing-masing pengelola kegiatan belajar dengan menggunakan pola sendiri-sendiri dalam menjalankan kegiatan belajar paket B.

Sistem evaluasi yang selama ini diterapkan dan yang diperhatikan hanya cenderung pada evaluasi hasil belajar, dan ini pun dilakukan dalam bentuk tes tertulis. Sementara evaluasi penyelenggaraan kegiatan, terutama yang terkait dengan warga belajar, tutor, fasilitator, penyelenggara, kesesuaian bahan belajar, keefektifan buku modul, buku pelengkap yang digunakan, serta proses belajar pembelajaran, menurut semua penyelenggara terabaikan, atau dengan kata lain belum pernah diselenggarakan secara terfokus oleh pihak-pihak yang terkait (Depdiknas). Jika ada bentuk evaluasi tersebut hanya bersifat *preferential* yang tidak ubahnya seperti pada aktifitas supervisi dan monitoring.

Sistem pelaporan kegiatan belajar paket B seharusnya dilakukan secara berjenjang yaitu laporan kemajuan belajar warga belajar disusun

tutor disampaikan pada penyelenggara dan pengelola. Laporan pelaksanaan proses belajar yang dilampiri kemajuan belajar disusun penyelenggara bersama pengelola disampaikan pada penilik pendidikan nonformal tingkat kecamatan. Laporan yang ada pada penilik pendidikan tingkat kecamatan dirangkum kemudian dilaporkan pada penilik pendidikan nonformal tingkat kabupaten. Laporan yang ada pada penilik pendidikan tingkat kabupaten dirangkum dan dilaporkan pada kepala seksi pendidikan masyarakat tingkat provinsi.

Kenyataan yang terjadi di lapangan memperlihatkan bahwa hampir semua level tidak pernah melaporkan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan, dan tidak sedikit laporan baru diberikan pada tiga bulan atau empat bulan sekali bahkan ada yang setahun sekali. Jika ditelusuri, tentang letak keterlambatan laporan, terdapat berbagai alasan yang dikemukakan, diantaranya, dari pihak yang lebih atas berargumen karena keterlambatan dari pihak bawah, sementara pada level yang paling bawah mengakui, bahwa tidak selamanya laporan diberikan terlambat, dan jika ada yang terlambat dikarenakan faktor teknis, terlupakan, dan ada yang menyatakan karena kesibukan dengan pekerjaan lain.

SIMPULAN

Seluruh peserta kegiatan belajar berlatar belakang pendidikan SD. Mereka mengikuti kegiatan belajar tersebut disamping kondisi ekonomi orangtua miskin, juga karena di sekitar lokasi tidak ada kegiatan lembaga pendidikan setingkat SLTP yang bisa terjangkau. Orangtua warga belajar sebagian besar tamat SD. Sekitar 65% peserta kegiatan kejar adalah wanita, dan hal ini terjadi karena masih banyak orangtua yang berasal dari keluarga miskin lebih mengutamakan pendidikan formal bagi anak laki-laki, dibandingkan wanita.

Pengelola kegiatan belajar paket B hampir semua berlatar belakang pendidikan guru, dan cara bertindak disamakan dengan pendidikan formal. Oleh karena itu mereka sering menemukan berbagai kendala, terutama terkait dengan motivasi warga belajar. Hal ini

terjadi karena, di saat pembelajaran metode dan teknik yang digunakan sama dengan pembelajaran pada sekolah-sekolah formal, dan kurang memahami tentang metode dan teknik serta proses pembelajaran pada pendidikan nonformal.

Perekrutan warga belajar dilakukan dengan beberapa cara secara simultan, yaitu bekerjasama dengan aparat desa, guru, organisasi terkait, dan petugas pendidikan luar sekolah. Dalam pelaksanaannya, tidak ada pemaksaan, namun dilakukan secara persuasif. Sedangkan para tutor direkrut atas dasar kemampuan, kemauan, dan pertimbangan dari dinas terkait. Waktu belajar ditentukan pengelola, tutor, dan sebagian warga belajar secara umum kegiatan belajar dilaksanakan sore hari, namun kegiatan pembelajaran tersebut pada umumnya berjalan kurang lancar. Materi belajar yang diberikan mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan, namun menurut para pengelola, tutor, dan warga belajar, bahwa potensi materi tersebut belum menyentuh kehidupan warga belajar, karena lebih bersifat pengetahuan bukan keterampilan untuk memecahkan masalah kehidupan warga belajar. Disamping itu, tidak mungkin pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh warga belajar bisa setara dengan yang diperoleh oleh siswa SLTP konvensional karena bahan belajar yang diberikan secara kualitas maupun kuantitas jauh lebih rendah dibandingkan SLTP konvensional.

Potensi sarana-prasarana sangat terbatas, sehingga baik tutor maupun warga belajar mengalami kesulitan dalam proses belajar-mengajar, dan akhirnya bermuara pada kualitas hasil belajar yang kurang memadai. Tutor sebelum melakukan proses kegiatan belajar, sebagian besar menyatakan telah mempersiapkan dengan baik, namun pelaksanaannya sering tidak berjalan sesuai dengan rencana, dan bahkan sebagian menyatakan bahwa kegiatan belajar paket B ini seringkali macet karena warga belajar tidak hadir. Sistem pembelajaran pada kegiatan ini sulit dilaksanakan secara maksimal, karena kehadiran warga belajar tidak rutin, motivasi belajar rendah, sulit menerima materi belajar.

Potensi kegiatan belajar paket B belum sepenuhnya mengantarkan warga belajar sampai dapat mengikuti ujian persamaan setingkat SLTP, dan rata-rata hanya sekitar 50-60% pada setiap kelompok belajar. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kegiatan belajar paket B tidak bisa menuntaskan lulusan SD yang tidak bisa menikmati pendidikan formal setingkat SLTP secara keseluruhan.

Sistem supervisi yang dilakukan petugas lazimnya hanya melakukan kunjungan ke lokasi pelaksanaan kegiatan. Bentuk-bentuk lain seperti, tes dadakan pada warga belajar, konferensi kasus, dan angket belum pernah dilakukan oleh petugas. Sedangkan sistem monitoring yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten selama ini dirasakan oleh semua petugas di lapangan sangat terbatas. Kegiatan ini biasanya hanya dilakukan dalam bentuk laporan bulanan dan atau sesekali petugas meninjau ke lokasi kegiatan belajar.

Sistem evaluasi yang sering dilakukan hanya evaluasi hasil belajar, sementara evaluasi penyelenggaraan kegiatan, terutama yang terkait dengan warga belajar, tutor, fasilitator, penyelenggara, kesesuaian bahan belajar, keefektifan buku modul, buku pelengkap yang digunakan, serta proses belajar pembelajaran, menurut semua penyelenggara terabaikan, atau dengan kata lain belum pernah diselenggarakan secara terfokus oleh pihak-pihak yang terkait. Jika ada bentuk evaluasi tersebut hanya bersifat preferensial yang tidak ubahnya seperti pada aktifitas supervisi dan monitoring. Sementara itu sistem pelaporan kegiatan belajar paket B yang selama ini berjalan sering tidak mematuhi jadwal dan prosedur yang ditetapkan, sehingga berdampak pada kebijakan-kebijakan mendatang yang akan diterapkan.

Mengingat bahwa peserta kegiatan belajar berlatar belakang ekonomi sangat lemah, maka hendaknya materi pembelajaran dikaitkan dengan upaya peningkatan ekonomi serta dalam proses pembelajaran selalu mempertimbangkan kegiatan ekonomi, dalam arti jangan sampai kegiatan belajar mengganggu aktifitas ekonomi warga belajar.

Para tutor dan pengelola secara umum merasa sulit memotivasi warga belajar untuk belajar, oleh karena itu hendaknya sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, petugas tersebut hendaknya diberikan pelatihan-pelatihan lebih dahulu tentang bagaimana melakukan kegiatan pembelajaran pada sistem pendidikan luar sekolah. Mengingat materi belajar yang diberikan belum menyentuh kehidupan masyarakat, maka hendaknya warga dibekali berbagai keterampilan guna memecahkan masalah kehidupan warga belajar.

Mengingat bahwa potensi sarana-prasarana sangat terbatas, hendaknya pihak-pihak yang terkait dan yang peduli terhadap kegiatan ini berupaya untuk membantunya, baik dalam bentuk materi maupun gagasan pemecahannya. Mengingat bahwa sistem supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan masih banyak mengandung berbagai kelemahan dan kekurangan dalam praktiknya, maka hendaknya petugas yang terkait berupaya meningkatkan kinerja dalam hal tersebut guna mencapai hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bledsoe, Katrina L & Graham, James A. 2005. The Use of Multiple Evaluation Approaches in Program Evaluation. *American Journal of Evaluation*. 26; 302.
- Chavis, D. 2004. Looking the enemy in the eye: Gazing into the mirror of evaluation practice. *The Evaluation Exchange*, 9, 8-9.
- Creswell, J. W. & Miller, D. L. 2000. Determining validity in qualitative inquiry. *Theory into Practice*, 39 (3), 124-131.
- Davies, D., & Dodd, J. 2002. Qualitative research and the question of rigor. *Qualitative Health research*, 12 (2), 279-289.
- Depdikbud. 1998. *Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Menjelang Abad 21*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Goni, J. Hein & Sampol. P. 1996. *Studi Evaluasi Keberhasilan Sistem Forum Pembangunan Pendidikan di Propinsi Sulawesi Utara*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. *APK/APM PAUD, SD, SMP, SMA, dan PT*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Latief, M. Adnan. 1996. *Tantangan Perkembangan Pendidikan di Kabupaten Pasuruan dan Malang Propinsi Jawa Timur*. Malang: Pusat Penelitian IKIP Malang.
- Markus, J.F. 1996. *Studi evaluasi pelaksanaan program Coplaner propinsi Nusa Tenggara Timur*. Kupang: Universitas Nusa Cendana.
- Owston, Ron. 2007. *Models and Methods for Evaluation*. Toronto, Canada: York University,
- Patton, M. Q. 2002. *Qualitative evaluation and research methods (3rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
- Seale, C. 1999. *Quality in qualitative research*. *Qualitative Inquiry*, 5(4), 465-478
- Scriven, M. 1997. Minimalist theory: The least theory that practice requires. *American Journal of Evaluation*, 19, 575-604.
- Stufflebeam, D. L. et. al. 2000. *Evaluation Models Viewpoints On Educational and Human Services Evaluation. Second Edition*. New York: Luwer Academic Publishers.
- Utsman. 2008. *Aspek-aspek Sosial Budaya yang Berpengaruh terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Hasil Penelitian tidak diterbitkan.